



Hidzfil Sebut Ada Peran Backing

● **Pemkot Harus Turun Tangan Atasi Tarif Parkir Liar**

YOGYA, TRIBUN - Pusat Rajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM) menilai tarif parkir yang tinggi di kawasan Yogyakarta tak lepas dari adanya backing. Untuk itulah peran negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Yogya harus hadir untuk bisa melakukan pengawasan agar tidak menjadi persoalan terus menerus.

"Kantong parkir dan tarif parkir yang legal ini tentunya tak lepas dari adanya aktor intelektual atau backing di belakang mereka. Untuk itu, pemerintah harusnya bisa membina dan mengawasinya," kata Peneliti Pukar UGM, Hidzfil Alm, Rabu (4/1).

Hidzfil menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan tarif parkir harus sesuai dengan UU. Maka, jika ada penentuan tarif parkir yang tidak sesuai aturan, alias ilegal, maka hal itu adalah pelanggaran.

Apalagi, sebut Hidzfil, banyak oknum juru parkir yang biasanya menggunakan karcis parkir sekali pakai untuk bekal-kali. Padahal, hal ini juga tidak dibenarkan dan masuk dalam kategori pungutan liar.

Pengawasan dari pemerintah memang benar-benar harus menyeluruh. Hal ini karena wewenang untuk menindak oknum juru parkir yang melakukan pelanggaran ada di tangan dinas terkait. Sementara, masyarakat hanya bisa melaporkan jika ada tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan.

"Jika masyarakat berhadapan langsung dengan tukang parkir justru akan menimbulkan konflik horizontal. Karena, tidak dapat dipungkiri, persoalan parkir ini juga menyangkut perut," urainya.

Mahal dan legal
Hidzfil pun menyebutkan beberapa hal yang

Dia mencontohkan, hal ini terjadi di kawasan Jalan Solo, di mana banyak badan jalan yang dipergunakan untuk akses parkir.

Selain itu, inspektur mendadak (sidak) pada parkir ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan parkir yang kerap dikeluhkan. Pemerintah pun harus berani mengambil langkah tegas dan tidak seolah membiarkan hal ini. Agar, tidak menjadi persoalan terus menerus.

"Jika bisa berjalan baik manajemennya, maka akan bisa menjadi salah satu solusi," ulas Hidzfil.

Pemkot tak mampu
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Wirawan Hariyo Yudo mengklaim telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada sekitar 900 juru parkir di tepi jalan umum. Pembinaan ini ditujukan agar para juru parkir tidak mematok tarif parkir dengan sangat tinggi. Sehingga, merugikan wisatawan ataupun warga lokal yang berada di pusat kota maupun objek wisata.

Wirawan juga menambahkan, adanya parkir liar ini tak lain karena terbatasnya kantong parkir yang disediakan oleh Pemkot. Sehingga, muncul kantong parkir liar yang memakan trotoar jalan, dan juga depan rumah warga.

Dinas Ketertiban (Dintib) mengklaim telah melakukan tindakan tegas pada juru parkir di luar ketentuan. Mereka pun menyatakan telah menerima aduan dan laporan dari masyarakat terkait dengan tarif parkir yang mencekik di sejumlah kawasan Kota Yogyakarta.

Sementara, kalangan legislatif Kota Yogyakarta berencana untuk melakukan evaluasi terkait tingginya tarif parkir yang terjadi setiap liburan panjang di Kota Yogyakarta. Hal ini lantaran pihak DPRD setempat merasa prihatin dengan kondisi praktik pungutan liar (pungli) parkir yang marak dan meresahkan wisatawan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti menilai Pemerintah Kota (Pemkot) tidak cukup mampu untuk mengatasi persoalan ini. Pasalnya, kejadian menaikan tarif parkir ini terus terjadi dan selalu muncul dalam momen liburan panjang.

"Maka, kami harus mengetahui problem besarnya apa sampai tidak bisa diatasi. Apakah karena ada transit Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, saya kira tidak ada kaitannya dengan itu," urainya. **(ais)**

- Din. Perhubungan
 - Din. Ketertiban
 ✓ Netral
 ✓ Segera
 ✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005